

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Pemerintah Siapkan Susunan Organisasi Tata Kerja Baru
Entitas / Cakupan	: Kota Cimahi
Sumber / Hal	: Galamedia/ Hal. 6
Edisi	: Selasa, 8 April 2018

Pemerintah Siapkan Susunan Organisasi Tata Kerja Baru

D. HARDJAKUSUMAH, (GM).-

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi akan mengevaluasi susunan organisasi tata kerja (SOTK) baru yang sudah ditetapkan sejak awal tahun 2017. Hal tersebut lantaran adanya beberapa perangkat daerah yang menangani pekerjaan lebih dari satu bidang.

Berdasarkan SOTK yang masih berlaku saat ini, ada perangkat daerah yang dipecah dan ada pula yang naik tingkat. Pada perubahan SOTK 2017 lalu, tercatat ada 15 dinas, 4 badan, 3 kecamatan ditambah kesbang, inspektorat, setwan, dan setda.

Selain itu, ada pula dinas baru hasil pecahan dari dinas lama di antaranya Dinas Komunikasi Informasi Arsip dan Perpustakaan, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kepala Bagian Organisasi pada Setda Kota Cimahi, Yulia Fitri menjelaskan perubahan SOTK mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

"Rencananya kita akan secepatnya

melakukan evaluasi SOTK. Evaluasi itu kan memang diperlukan untuk penyesuaian juga," kata Yulia didampingi Kasubag Kelembagaan, Rina Erlina, saat ditemui di kantor Pemkot Cimahi, Jalan D. Hardjakusumah, Senin (7/5).

Diakuinya, sejauh ini sudah ada perangkat daerah yang mengusulkan untuk dipecah kembali. Seperti Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2KB-P3A).

Namun, kata dia, peleburan perangkat daerah bukanlah perkara mudah. Pasalnya, selain prosesnya panjang dan butuh pengkajian, ada juga sisi lain yang mesti dipikirkan.

Di antaranya kemampuan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Pemkot Cimahi. Sebab, ujar Yulia, SDM yang dimiliki saat ini saja masih kurang. Buktinya, masih ada beberapa perangkat daerah yang belum memiliki kepala dinas hingga saat ini.

"Prosedurnya panjang, ini tidak gampang, perlu kajian. Kalau memungkinkan berpisah ya silakan asal sepanjang itu

sesuai dengan aturan," ujar Yulia.

Dipecah

Kepala Dinsos P2KBP3A Kota Cimahi, Erick Yudha menilai dinasnya perlu dilebur kembali. Pada tubuh Dinsos P2KB-P3A, terdapat tiga bidang, yakni bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Menurut Erick, alangkah lebih efektif bila bidang sosial dipecah lagi menjadi Dinas Sosial. Pasalnya, bagian Sosial itu

merupakan urusan dasar untuk penanganan masalah sosial di Cimahi.

"Sebetulnya alangkah baiknya itu bisa terpisah. Akan lebih efektif untuk penanganan kesejahteraan sosial, jadi cakupannya tidak terlalu luas," katanya.

Namun, peleburan dinas itu tergantung pada kemampuan anggaran dan sumber daya yang dimiliki Pemkot Cimahi.

"Nantinya kembali juga kepada kemampuan anggaran dari pemerintah sendiri, termasuk ketersediaan SDM," tandasnya. (wis)**